



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 4.982.847.244.766,99 bertambah sejumlah Rp. 389.804.396.093,14 sehingga menjadi Rp. 5.372.651.640.860,13 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 3.683.675.900.252,16
b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 413.977.365.387,50)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 3.269.698.534.864,66

2. Belanja

a. Semula	Rp. 4.982.847.244.766,99
b. Bertambah/(berkurang) (Rp. 393.204.385.310,64)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 5.376.051.630.077,63</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 393.204.385.310,64

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 1.299.171.344.514,83

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 807.181.750.698,14

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 2.106.353.095.212,97

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 2.106.353.095.212,97

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp.337.287.017.893,16

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 337.287.017.893,16

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp.3.108.683.559.359,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 441.495.802.705,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 2.667.187.756.654,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 237.705.323.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 27.518.437.317,50

Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 265.223.760.317,50

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp.48.825.970.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 48.825.970.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp.51.255.524.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 51.255.524.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	36.498.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	36.498.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	200.707.523.893,16
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	200.707.523.893,16

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	3.108.683.559.359,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. <u>441.495.802.705,00</u>)		
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	2.667.187.756.654,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.		0,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp.		0,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Dana darurat

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp.	50.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.399.989.217,50</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	53.399.989.217,50

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	180.571.323.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>18.752.418.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	199.323.741.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	7.134.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.366.030.100,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	12.500.030.100,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	1.993.473.860.537,79
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>45.649.913.827,84</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	2.039.123.774.365,63

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	2.989.373.384.229,20
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>347.554.471.482,80</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	3.336.927.855.712,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	1.203.814.113.468,21
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>70.253.504.046,41</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	1.274.067.617.514,62

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp.11.652.340.735,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 11.652.340.735,00

d. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 170.308.535.400,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 11.536.165.200,00)
 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 158.772.370.200,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp.8.280.100,000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 8.280.100,000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp.10.008.149.400,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 10.008.149.400,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp.584.983.743.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp.28.454.582.000,00)
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 556.529.161.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 4.426.878.534,58
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 15.387.156.981,43
 Jumlah Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 19.814.035.516,01

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp.172.331.649.062,00
 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 4.783.863.600,00)
 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 167.547.785.462,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp.893.783.632.559,20
 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 96.862.105.186,80
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp.990.645.737.746,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 1.923.258.102.608,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>255.746.961.146,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 2.179.005.063.754,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.1.299.171.344.514,83
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>807.181.750.698,14</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 2.106.353.095.212,97

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp. 885.808.033.708,83
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>380.741.345.965,14</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp. 1.266.549.379.673,97

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp. 413.363.310.806,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>426.440.404.733,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 839.803.715.539,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah
Perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah
Perubahan Rp. 0,00

e. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat darurat dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Kriteria untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
 - e. Merupakan belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan perubahan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD; |
| 3. Lampiran III | Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; |
| 6. Lampiran VI | Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; |

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Dalam hal landasan operasional pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 7 Desember 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 5